BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa literatur hasil penelitian sebelumnya :

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Erliyani & Sulastiningsih, 2023) Pengaruh Regulasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Aplikasi Sipd Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Magelang	1. Pengaruh Regulasi (X1) 2. Perencanaan Anggaran (X2) 3. Pelaksanaan Anggaran (X3) 4. Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) 5. Penerapan Aplikasi SIPD (X5) 6. Penyerapan Anggaran	Regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja, sedangkan regulasi, perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan aplikasi SIPD tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.	Variabel Perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan penyerapan anggaran	Variabel regulasi, pelaksanaan anggaran dan penerapan aplikasi SIPD
2	(Fitriasuri & Yuliani, 2022) Penyerapan Anggaran	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Kompetensi Sumber Daya	Metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Variabel Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya	Pengelolaan data menggunakan SPSS

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Berdasarkan Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Komitmen Organisasi	Manusia (X2) 3. Komitmen Organisasi (X3) 4. Penyerapan Anggaran (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan	Manusia, Komitmen Organisasi dan Penyerapan Anggaran	
3	(Ferdinan *et al*., 2020) Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia	1. Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1) 2. Pelaksanaan Anggaran (X2) 3. Komitmen Organisasi (Z) 4. Penyerapan Anggaran (Y)	Regresi linear berganda Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.Komitmen organisasi tidak memperkuat	Variabel Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, Penyerapan Anggaran	Variabel Pelaksanaan Anggaran

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			atau memperlemah hubungan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.		
4	(Christofer & Darmawati, 2024) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Revisi Anggaran, Kompetensi SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Pelaksanaan Anggaran (X2) 3. Revisi Anggaran (X3) 4. Kompetensi SDM (X4) 5. Pengadaan Barang Dan Jasa (X5) 6. Penyerapan Anggaran	Regresi Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi anggaran memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM, dan pengadaan barang dan jasa tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran	Variabel Perencanaan Anggaran, Kompetensi SDM Dan Penyerapan Anggaran	Variabel Pelaksanaan Anggaran, Revisi Anggaran Dan Pengadaan Barang Dan Jasa
5	(Sulistyani & Wismadi, 2021) Motivasi Dan	1. Motivasi (Z1) 2. Kompetensi	Analisa kualitas kuesioner, uji asumsi klasik, uji	Variabel Kompetensi sumber Daya	Variabel Motivasi

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kompetens sumber Daya manusia Sebagai Pemoderasi Pengaruh Perencanaan anggaran Terhadap Penyerapan anggaran Belanja pada Dispora Kabupaten Wonogiri	sumber Daya manusia (Z2) 3. Perencanaan anggaran (X1) 4. Penyerapan Anggaran Belanja (Y)	hipotesis serta regresi perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada penyerapan anggaran belanja. Selain itu motivasi terbukti mampu memoderasi hubungan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja, akan tetapi kompetensi SDM terbukti bukan merupakan variabel moderating antara perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja.	manusia, Perencanaan anggaran dan Penyerapan Anggaran Belanja	
6	(Lestari & Yuliani, 2022) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Pelaksanaan Anggaran (X2) 3. Kualitas Sumber Daya	Regresi linier berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan	Variabel Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Penyerapan	Variabel Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa,

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa Dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja	Manusia (X3) 4. Pengadaan Barang/Jasa (X4) 5. Komitmen Organisasi (X5) 6. Penyerapan Anggaran (Y)	pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.	Anggaran	
7	(Mustakim *et al*., 2023) Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Ketersediaan Anggaran Kas Terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Ketersediaan Anggaran Kas (X2) 3. Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran (Y)	Regresi Linier Berganda menggunakan alat analisis SPSS Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran, Ketersediaan Anggaran Kas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap	Variabel Perencanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran	Variabel Ketersediaan Anggaran Kas
8	(Nursela *et al*., 2022) Perencanaan Anggaran,	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Kualitas	Regresi linier berganda menggunakan SPSS	Variabel Perencanaan Anggaran, Kualitas	Variabel Pelaksanaan Anggaran

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Pada Penyerapan Anggaran	Sumber Daya Manusia (X2) 3. Pelaksanaan Anggaran (X3) 4. Komitmen Organisasi (X4) 5. Penyerapan Anggaran (Y)	Hasil penelitian bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran	Sumber Daya Manusia, , Komitmen Organisasi dan Penyerapan Anggaran	
9	(Tarigan *et al*., 2024) Pengaruh Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Penyerapan Anggaran	1. Pelaksanaan Anggaran (X1) 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) 3. Penyerapan Anggaran (Z) 4. Kinerja Manajerial (Y)	Menggunakan PLS Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 1. Pelaksanaan anggaran,kualitas sumber daya manusia , penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 2. Pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran,	Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penyerapan Anggaran	Variabel Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Manajerial

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			3. Penyerapan anggaran mampu memediasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap kinerja manajerial, 4. Penyerapan anggaran tidak mampu memediasi pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial		
10	(Rahmawati *et al*., 2021) Evaluasi perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen manajemen sebagai pemoderasi pada satuan kerja kementerian agama Republik Indonesia di	1. Evaluasi Perencanaan Anggaran (X1) 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 3. Komitmen Manajemen (Z) 4. Penyerapan Anggaran (Y)	Analisis multiple regression (regresi berganda) dan moderated regression analysis (MRA) Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, dan komitmen organisasi hadian berpengaruh terhadap tingkat	Variabel Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penyerapan Anggaran	Variabel Komitmen Manajemen

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kota Jambi		penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini telah berkontribusi terhadap OPD oleh meningkatkan penyerapan pendapatan dan belanja daerah anggaran.		
11	(Saragih *et al*., 2022) Peran Motivasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Pelaksanaan Anggaran (X2) 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) 4. Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (X4) 5. Motivasi (Z1) 6. Komitmen Organisasi (Z2) 7. Penyerapan Anggaran (Y)	Menggunakan Least Squares Structural Equation Modeling (PLS – SEM) Dengan Program Perangkat Lunak Smart PLS 3.0 Hasil penelitian menunjukkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Variabel komitmen organisasi memoderasi	Variabel Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Penyerapan Anggaran	Variabel Pelaksanaan Anggaran, Proses Pengadaan Barang Dan Jasa dan Motivasi

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja Organisasi. Namun, tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja Organisasi. Variabel motivasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, proses pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun, tidak dapat memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap		

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			penyerapan anggaran belanja.		
12	(Ananda *et al*., 2022) Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran	1. Perencanaan Penganggaran (X1) 2. Kompetensi Aparatur Pemerintah (X2) 3. Penyerapan Anggaran (Y)	SPSS IBM versi 25 dengan teknik analisis regresi linier berganda Hasil kajian menunjukkan perencanaan penganggaran dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada BPKAD Kota Palembang.	Variabel Perencanaan Penganggaran dan Penyerapan Anggaran	Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah
13	(Sesilia *et al*., 2023) Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) 3. Tingkat Penyerapan Anggaran (Y)	Metode regresi linier sederhana Perencanaan anggaran dan Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran, Perencanaan	Variabel Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penyerapan Anggaran	Pengolahan Data Menggunakan SPSS

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Berencana Kota Banda Aceh				
14	(Marsontio *et al*., 2022) Keterlambatan Penyerapan Anggaran: Peran Komitmen Organisasi Sebagai Moderasi	1. perencanaan anggaran (X1) 2. pelaksanaan anggaran (X2) 3. kualitas SDM (X3) 4. administrasi (X4) 5. dokumen pengadaan (X5) 6. Komitmen organisasi (Z) 7. Keterlambatan Penyerapan Anggaran (Y)	Regresi berganda, dan Moderate Regression Analysis perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas SDM, administrasi, dan dokumen pengadaan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Komitmen organisasi memoderasi pengaruh perencanaan anggaran, kualitas SDM, administrasi, dan dokumen pengadaan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Namun komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap	Variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, Komitmen organisasi, Keterlambatan Penyerapan Anggaran	Variabel pelaksanaan anggaran dan dokumen pengadaan

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			keterlambatan penyerapan anggaran.		
15	(Nurcahyati & Nawatmi, 2022) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Universitas Negeri Semarang)	1. perencanaan anggaran (X1) 2. pelaksanaan anggaran (X2) 3. kualitas sumber daya manusia (X3) 4. pengadaan barang/jasa (X4) 5. komitmen organisasi (Z) 6. penyerapan anggaran (Y)	Analisis SmartPLS v.3.3.3 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Selanjutnya, variabel komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran	Variabel perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan penyerapan anggaran	Variabel pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa
16	(Wahyuni *et al*., 2022)	1. Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1)	Regresi linier berganda	Variabel Perencanaan Anggaran, Kualitas	Penegolaan data menggunakan SPSS

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada Satker Kementerian Perindustrian diKota Padang)	2. Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) 3. Penyerapan Anggaran (Y)	Hasil analisis diketahui bahwa Variabel perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara bersama-sama penyerapan anggaran	Sumber Daya Manusia dan Penyerapan Anggaran	
17	(Rika *et al*., 2024) Hubungan Perencanaan Anggaran Dan Sumber Daya Manusia Dengan Serapan Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Sumber Daya Manusia (X2) 3. Serapan Anggaran (Y)	Regresi Berganda dengan software SPSS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap serapan anggaran pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, Hasil pengujian membuktikan bahwa perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan	Variabel Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Serapan Anggaran	Pengolahan data menggunakan SPSS

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			anggaran		
18	(Yuniati & Putri, 2023) Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh	1. Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1) 2. Pelaksanaan Anggaran (X2) 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) 4. Lingkungan Birokrasi (X4) 5. Penyerapan Anggaran (Y)	analisis Structural Equation Modeling (SEM) dan pengujian SEM ini menggunakan aplikasi SmartPLS penelitian menunjukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.	Variabel Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penyerapan Anggaran	Variabel Pelaksanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi
19	(Wati *et al*., 2023) Pengaruh Perencanaan	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Pelaksanaan Anggaran (X2)	Analisis regresi linier berganda Hasil penelitian menunjukkan	Variabel Perencanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran	Variabel Pelaksanaan Anggaran

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pada kabupaten Luwu Timur	3. Penyerapan Anggaran (Y)	bahwa Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Penyerapan Anggaran		
20	(Syahwildan & Damayanti, 2022) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Pelaksanaan Anggaran (X2) 3. Pencatatan Administrasi (X3) 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4) 5. Penyerapan Anggaran (Y)	Analisis regresi linier berganda Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran.	Variabel Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyerapan Anggaran	Variabel Pelaksanaan Anggaran dan Pencatatan Administrasi,
21	(Rahayu & Isnowati, 2024) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan	1. Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) 2. Perencanaan Anggaran (X2) 3. Pelaksanaan Anggaran (X3)	Analisis regresi linier berganda Hasil penelitian 1. Variabel pelaksanaan anggaran, perencanaan anggaran, pengadaan	Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran	Variabel Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pencatatan Administrasi

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Anggaran, Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Pencatatan Administrasi Terhadap Penyerapan Apbd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4. Pengadaan Barang Dan Jasa (X4) 5. Pencatatan Administrasi (X5) 6. Penyerapan Anggaran (Y)	barang dan jasa, serta pencatatan administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 2. Variabel kualitas SDM tidak mempengaruhi penyerapan APBD		
22	(Mahfuzah *et al*., 2024) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Uang Persediaan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran	1. Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1) 2. Pelaksanaan anggaran (X2) 3. Uang Persediaan (X3) 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4) 5. Penyerapan Anggaran (Y)	Analisis regresi linier berganda Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, uang persediaan, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Banjarmasin	Variabel Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyerapan Anggaran	Variabel Pelaksanaan anggaran dan Uang Persediaan
23	(Puluala, 2021) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,	1. Perencanaan Anggaran (X1) 2. Pelaksanaan Anggaran (X2) 3. Kualitas Sumber	Analisis regresi linier berganda Perencanaan Anggaran Sumber Daya Manusia	Variabel Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penyerapan	Variabel Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang Dan Jasa

No	Penulis	Variabel	Metode & Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga)	Daya Manusia(X3) 4. Pengadaan Barang Dan Jasa (X4) 5. Penyerapan Anggaran (Y)	berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran, namun pelaksanaan Anggaran, pengadaan Barang dan Jasa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah	Anggaran	

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1 Mekanisme Penyusunan APBD

APBD merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang disusun dan disetujui setiap tahunnya. Proses pengesahan APBD melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD, dengan pengesahan akhir dilakukan melalui Peraturan Daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi Pemda dalam menentukan kebijakan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, APBD mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, anggaran belanja, dan pembiayaan daerah. Adapun mekanisme penyusunannya mengikuti ketetapan yang tertera pada UU tersebut:

1. Proses Pengajuan: Pemerintah daerah melakukan pengajuan draf Peraturan Daerah mengenai APBD beserta penjelasan rinci serta dokumen pendukung

lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengajuan ini dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober, setahun sebelum pelaksanaan anggaran yang dimaksud. Pada tahap ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan sebagai pengguna anggaran mulai menyusun rencana kerja dan anggaran untuk SKPD tahun yang akan datang.

2. Tahap Pembahasan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian menjalankan proses deliberasi terhadap rancangan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Dalam tahapan ini, DPRD memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau usulan yang berpotensi mengubah komposisi pendapatan serta belanja dalam rancangan tersebut. Adapun keputusan final dari DPRD wajib ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Penetapan APBD: Jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan persetujuan terhadap rancangan tersebut, maka dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) akan diresmikan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme Peraturan Daerah. Namun, apabila terjadi penolakan, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengeluaran berdasarkan ketetapan APBD sebelumnya. Setelah memperoleh persetujuan, substansi APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah selanjutnya akan dielaborasi melalui Peraturan Gubernur, Wali Kota, atau Bupati. Dokumen APBD yang telah mendapatkan legitimasi dari DPRD ini memuat rincian yang komprehensif, mencakup struktur organisasi, fungsi, program, kegiatan, serta klasifikasi jenis belanja yang direncanakan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, tahapan proses penyusun APBD (Permendagri Republik Indonesia, 2024):

1. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah (Paling lambat minggu I bulan Juli).
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD (Paling lambat minggu II bulan Juli).
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (Paling lambat minggu II bulan Agustus).
4. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Paling lambat minggu III bulan Agustus).
5. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh APIP Daerah (Paling lambat minggu III bulan Agustus).
6. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD (Paling lambat minggu III bulan Agustus).
7. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD (60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah).
8. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah (Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan).
9. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama).

10. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/ Gubernur).
11. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi).
12. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan).
13. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir Desember/31 Desember).
14. Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan).

Anggaran merupakan dokumen perencanaan keuangan yang secara sistematis menggambarkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam satuan nilai moneter untuk periode tertentu. Penyusunan anggaran ini mempertimbangkan data historis sebagai acuan dalam upaya pengendalian

serta sebagai instrumen untuk mengevaluasi efektivitas kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nursela *et al*., 2022).

Menurut Mardiasmo (2018) dalam(Ayu, 2024) proses penyusunan anggaran ada empat, meliputi:

1. Persiapan Anggaran. Proses perencanaan anggaran yang mencakup estimasi anggaran pengeluaran dan pendapatan perlu dilaksanakan dengan kedalaman yang lebih rinci dan presisi, guna memastikan kelancaran pembiayaan atas pengeluaran yang telah direncanakan.
2. Ratifikasi. Pemimpin eksekutif wajib menguasai aspek keuangan secara mendalam untuk dapat memberikan jawaban yang berbobot serta argumen yang logis terhadap segala pertanyaan dan sanggahan yang diajukan oleh pihak legislatif.
3. Implementasi Anggaran. Eksekutif harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajerial, agar proses implementasi anggaran dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Manajemen Anggaran. Dalam melaksanakan anggaran, pihak eksekutif harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan memantau anggaran dengan menggunakan pendekatan manajerial yang efisien, agar hasil dari pelaksanaan anggaran dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
5. Pelaporan dan Evaluasi. Setelah pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan proses pertanggungjawaban yang menyeluruh dan evaluasi yang komprehensif, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntabilitas untuk menilai sejauh mana anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

2.2.2 Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran Menurut (Darmayanti, 2024) yakni gambaran sejauh mana tujuan atau sasaran instansi pemerintah telah tercapai sebagaimana perkembangan visi dan misi, serta strategi instansi pemerintah menunjukkan berhasil serta gagalnya dalam kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan apa yang telah ditetapkan dalam program tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006, kinerja didefinisikan sebagai hasil dari aktivitas atau program yang tercapai, baik yang sudah terwujud maupun yang akan datang, dengan mengacu pada penggunaan anggaran yang dapat diukur baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dalam konteks organisasi sektor publik, pengukuran kinerja menjadi tantangan tersendiri, terutama pada organisasi nirlaba murni seperti lembaga pemerintah, yang memiliki karakteristik dan tujuan yang lebih kompleks dan tidak selalu berbasis pada hasil finansial. Sampai saat ini, sulit untuk mengukur keberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya. Capaian kinerja suatu instansi, salah satunya dapat dilihat melalui penyerapan anggaran yang maksimal, walaupun kualitasnya rendah. Hal ini yang membuat sektor publik sulit diukur kinerjanya.

Dalam penelitian yang dilakukan (Ferdinan *et al.,* 2020) menyatakan Penyerapan anggaran merujuk pada pelaksanaan anggaran dalam jangka waktu tertentu, yang memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan berhasil dicairkan. Dalam konteks suatu satuan kerja, tingkat penyerapan anggaran dapat memberikan gambaran umum mengenai kinerja organisasi. Penyerapan anggaran yang optimal dan sesuai dengan perencanaan awal mencerminkan kinerja yang baik, sedangkan jika penyerapan anggaran

cenderung terakumulasi pada akhir periode anggaran, hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam pengelolaan anggaran oleh satuan kerja tersebut. Untuk menganalisis penyerapan anggaran, biasanya dilakukan perbandingan antara total anggaran yang disetujui dengan anggaran yang telah direalisasikan sepanjang tahun anggaran. Bagi masyarakat umum, penyerapan anggaran lebih sering disebut sebagai pencairan anggaran. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses penyerapan anggaran dalam entitas organisasi sektor publik termasuk dalam Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah merupakan suatu rangkaian mekanisme yang menggambarkan pelaksanaan serta implementasi penggunaan anggaran yang telah tercatat secara resmi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam periode yang telah ditentukan.

2.2.3 Perencanaan Anggaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, prosedur penganggaran dan penetapan anggaran menjadi elemen yang integral dalam perencanaan keuangan daerah. Proses perencanaan, sebagai tahap awal dalam pengelolaan anggaran, sangat krusial, baik dalam organisasi publik maupun sektor lainnya, karena menentukan keberhasilan operasional melalui optimalisasi penyerapan anggaran. Proses perencanaan anggaran mencakup langkah-langkah strategis yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi, merumuskan strategi pencapaian tujuan secara komprehensif, serta menyusun sistem perencanaan yang terintegrasi untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan yang efektif. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan perencanaan anggaran meliputi

kesesuaian dengan kebutuhan, kepatuhan terhadap regulasi, kemudahan pemahaman, minimnya kesalahan administratif, ketepatan waktu, dan tingkat partisipasi yang terlibat (Purwati *et al*., 2021).

Perencanaan anggaran merupakan tindakan menetapkan proyeksi arus kas masuk dan keluar serta strategi untuk mengamankan dana yang diperlukan untuk jangka waktu tertentu (Putra *et al*., 2021). Anggaran yang dipikirkan dengan baik adalah hasil dari proses multi-langkah yang dimulai dengan menentukan tujuan organisasi dan berlanjut melalui pemilihan strategi yang tepat, pengembangan sistem perencanaan yang komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan akhirnya realisasi tujuan tersebut (Fadhilatunnisa *et al*., 2021). Anggaran dapat dipahami sebagai sebuah dokumen perencanaan yang terstruktur dalam bentuk satuan moneter, yang mencakup serangkaian aktivitas organisasi dan diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Fungsi utama dari anggaran adalah sebagai pedoman untuk meramalkan alokasi pengeluaran dan pendapatan yang diperkirakan dalam periode yang telah ditentukan (Bastian, 2019). Dari uraian yang telah disampaikan, dapat diinterpretasikan bahwa penyusunan anggaran adalah suatu mekanisme sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangan secara bijaksana. Proses ini dirancang agar pemanfaatan dana di masa mendatang dapat berjalan dengan efisien serta selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan (Salwah, 2019).

2.2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merujuk pada potensi menyeluruh yang dimiliki individu, mencakup aspek intelektual dan fisik. Kedua dimensi ini dipengaruhi oleh faktor

keturunan dan lingkungan sosial, sementara pencapaian kinerja individu ditentukan oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kepuasan. Secara lebih mendalam, sumber daya manusia terdiri dari kapasitas kognitif dan fisik setiap individu, yang secara keseluruhan menentukan kemampuan dan kualitasnya. Tanpa keterlibatan aktif sumber daya manusia, bahkan peralatan teknologi tercanggih sekalipun tidak akan memiliki makna signifikan. Aspek intelektual merupakan bawaan sejak lahir, sebagai modal dasar, sementara keterampilan diperoleh melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Ukuran kecerdasan individu dapat dilihat dari indikator seperti Intelligence Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ). Kompetensi sumber daya manusia dievaluasi melalui kemampuan, keterampilan, perilaku, tingkat pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki (Yuniati & Putri, 2023).

Dalam penelitian (Kennedy *et al*., 2020) Keterampilan individu menjadi elemen krusial yang memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan pekerjaan. Keahlian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mumpuni dapat diukur melalui tingkat pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya, serta keberlanjutan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh dunia kerja. Pengalaman yang terus berkembang dan berbagai peluang yang diperoleh menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas ASN. Terkhusus bagi karyawan dengan pendidikan tinggi dan kualifikasi teknis, mereka cenderung lebih mampu beradaptasi dan melakukan inovasi dalam konteks eksternal. Oleh karena itu, organisasi atau instansi yang memiliki pegawai dengan kualitas tinggi dan kemampuan implementasi yang baik akan lebih efisien dalam mengelola penyerapan anggaran. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi tinggi merupakan elemen krusial dalam memastikan efektivitas penyelesaian tugas-tugas administratif. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah sangat bergantung pada kesiapan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan berpikir secara logis dan rasional, tetapi juga mampu menjalankan tugas pokok serta fungsi pemerintahan dengan tingkat profesionalisme dan efisiensi yang optimal (Hului *et al*., 2023).

2.2.5 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi pada Penelitian Meyer dan Allen (1984) dikutip dalam (S. Rahayu & Yuditiya, 2023) Komitmen organisasi sering dipandang sebagai suatu konsep yang bersifat multidimensional, yang dapat dianalisis melalui dua dimensi utama. Pertama, komitmen afektif, yang merefleksikan keterikatan emosional dan identifikasi pegawai terhadap organisasi. Kedua, komitmen berkelanjutan, yang berkaitan dengan kesadaran akan konsekuensi yang muncul jika pegawai memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya. Secara esensial, komitmen organisasi terbentuk dan berkembang melalui interaksi antara individu dan lingkungan kerjanya, di mana nilai-nilai, visi, serta misi organisasi diinternalisasi dan diadopsi oleh setiap pegawai sebagai bagian dari identitas profesional mereka (Goo *et al*., 2019). Komitmen organisasi memainkan peran krusial dalam membentuk hubungan yang kokoh dan saling menguntungkan antara individu dan organisasi demi tercapainya tujuan strategis instansi pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan cita-cita utama setiap pemimpin daerah. Pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari kontribusi komitmen yang solid dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernaung di bawah instansi pemerintah daerah. Komitmen

individu ASN terhadap organisasi tercermin dalam upaya konkret untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ASN diharapkan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan proses penyusunan laporan keuangan agar hasil akhirnya tidak hanya memenuhi standar yang berlaku, tetapi juga mampu meminimalisir risiko terjadinya praktik kecurangan serta memastikan penggunaan dana publik yang tepat sasaran. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian (Wiener,1982) dalam (Ferdinan *et al*., 2020) Komitmen organisasi merujuk pada motivasi internal individu untuk mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi, dengan menempatkan kepentingan organisasi sebagai prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil. Ada dua konsep dominan terkait dengan komitmen organisasi berdasarkan pendapat Muthuvello dan Rose (2005) dikutip dalam (Yateno, 2020). Pertama, komitmen organisasi dapat dipahami sebagai suatu kondisi psikologis yang menghubungkan individu dengan organisasi secara lebih mendalam. Kedua, komitmen ini berpengaruh terhadap keputusan pegawai, baik untuk mempertahankan keanggotaannya atau memilih untuk meninggalkan organisasi. Menurut Metin & Aslin (2018), Komitmen organisasi merupakan suatu konsep yang sangat esensial, mengingat dampaknya yang meluas tidak hanya pada individu karyawan, tetapi juga pada struktur dan kinerja organisasi secara keseluruhan, bahkan masyarakat secara lebih luas. Bagi karyawan, komitmen ini tercermin dalam penghargaan yang diterima, baik yang bersifat intrinsik maupun

ekstrinsik, yang selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas, komitmen organisasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Keyakinan yang mendalam dan pemahaman penuh terhadap tujuan serta prinsip-prinsip yang dijunjung oleh organisasi;
2. Kesiapan untuk memberikan kontribusi yang signifikan melalui usaha yang optimal demi kemajuan organisasi;
3. Dorongan internal yang kuat untuk menjaga dan mempertahankan status keanggotaan dalam organisasi.

Komponen-komponen yang membentuk komitmen organisasi merujuk pada kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku prososial. Individu dengan tingkat komitmen yang tinggi terhadap organisasi umumnya lebih rela menyumbangkan waktu, energi, dan sumber daya pribadi demi keberlanjutan dan kemajuan organisasi. Dalam konteks evaluasi kinerja, komitmen organisasi berperan sebagai indikator utama. Karyawan yang menunjukkan komitmen yang kuat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap individu yang bergabung dengan organisasi diharapkan untuk menumbuhkan komitmen terhadap dirinya sendiri, yang pada gilirannya diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan kinerja mereka (Anggadini *et al*., 2021).

2.3. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.3.1 Hubungan antar variabel:

1. Hubungan antara perencanaan anggaran terhadap kinerja anggaran

Dalam kerangka pencapaian tujuan yang ditetapkan, yaitu penyerapan anggaran, perencanaan yang matang berperan sebagai faktor yang mengatasi kendala dalam proses serapan anggaran yang lambat. Namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun perencanaan yang baik dapat meminimalisir hambatan tersebut, hal itu tidak menjamin bahwa hasil yang dicapai akan selalu sesuai dengan sasaran yang diinginkan (Diko *et al*., 2023) . Hasil penelitian yang dilakukan (Fitriasuri & Yuliani, 2022) Perencanaan anggaran memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Perencanaan yang dirancang secara teliti dan berdasarkan pertimbangan yang matang akan berperan penting dalam menentukan sejauh mana anggaran tersebut dapat terealisasi dengan optimal. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Suyono, 2020), (Renoat & Latupeirissa, 2019), (Oktaliza *et al*., 2020), dan (Ferdinan *et al*., 2020) mengungkapkan bahwasanya faktor perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran

2. Hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja anggaran

Penelitian yang dilakukan oleh (Syahwildan & Damayanti, 2022) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) terbukti memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap efektivitas penyerapan anggaran di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. SDM memiliki peran sentral dalam

implementasi anggaran, mengingat bahwa kualitas dan kemampuan SDM menjadi elemen krusial dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan. Pengelolaan SDM yang baik menjadi suatu keharusan bagi setiap organisasi yang bertujuan mencapai hasil yang optimal. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil yang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya (Fitriasuri & Yuliani, 2022), (Lestari & Yuliani, 2022), (Nursela *et al*., 2022), (Tarigan *et al*., 2024), (Rahmawati *et al*., 2021), (S. Rahayu & Yuditiya, 2023) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

H2: Kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran

3. Komitmen organisasi memperkuat hubungan antara perencanaan anggaran terhadap kinerja anggaran

Keterlibatan yang mendalam dalam organisasi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mendorong para pengelola anggaran untuk meningkatkan potensi mereka dalam merumuskan anggaran dengan presisi yang tinggi, demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Proses ini mencakup perencanaan beragam program dan aktivitas yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang ada, yang pada akhirnya memfasilitasi realisasi target penyerapan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan (Sari et al., 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati *et al*., 2021), (Saragih *et al*., 2022), (Marsontio *et al*., 2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi mampu mempengaruhi Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.

H3: Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja anggaran

4. Komitmen organisasi memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja anggaran

Kompetensi sumber daya manusia merupakan elemen fundamental dalam mencapai tujuan organisasi. Individu yang memiliki kapasitas lebih dalam memenuhi target yang telah ditentukan akan cenderung menampilkan kemampuan maksimalnya untuk meraih tujuan tersebut. Ketika kompetensi sumber daya manusia dipadukan dengan komitmen yang kuat terhadap organisasi, mereka akan berusaha keras dalam pengelolaan anggaran yang efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada optimalisasi penyerapan anggaran. Komitmen organisasi yang kokoh berperan sebagai pendorong bagi tim pengelola anggaran untuk mengoptimalkan seluruh potensi mereka dalam meningkatkan tingkat penyerapan anggaran. Penelitian mengindikasikan bahwa semakin kuat keselarasan antara kompetensi pegawai dengan komitmen mereka terhadap organisasi, semakin optimal pula kinerja yang tercapai dalam hal penyerapan anggaran (Sirin *et al*., 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati *et al*., 2021), (Saragih *et al*., 2022), (Marsontio *et al*., 2022) juga mengemukakan bahwa komitmen organisasi mampu mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran.

H4: Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja anggaran.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

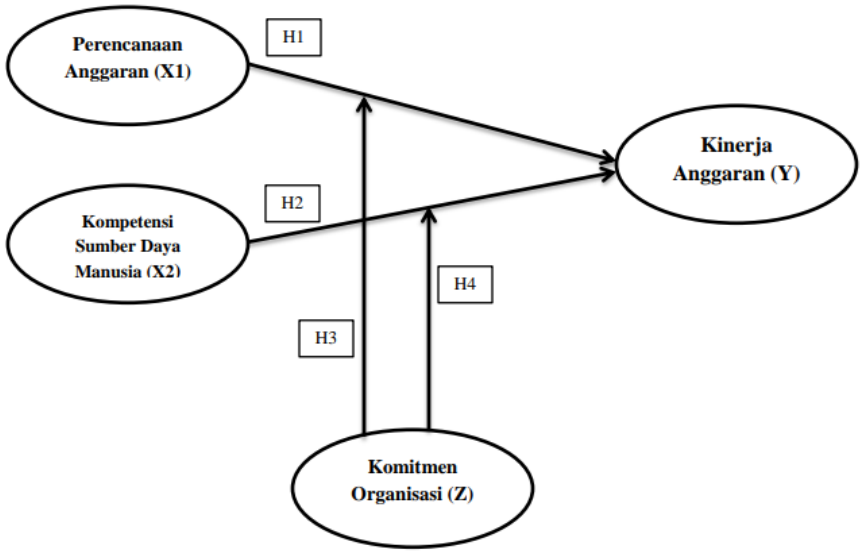

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual